



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 30
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat 1
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 28 Juni 2022
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: - Laporan Panja 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua ke Rapat Kerja TK I; - Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI dan Pemerintah; - Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Draf 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua; - Penandatanganan Peta Wilayah.
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 39 (tiga puluh sembilan) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Pimpinan DPD RI; C. Menteri Dalam Negeri RI; D. Menteri PPN/ Bappenas RI; E. Menteri Hukum dan HAM RI; dan F. Menteri Keuangan RI.

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat 1 ke-2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda laporan Panja 3 (tiga) RUU

tentang Pembentukan Provinsi Papua ke Raker Tingkat 1, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI dan Pemerintah, pengambilan keputusan dan penandatanganan draf 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua, dan penandatanganan peta wilayah, pada hari Selasa, 28 Juni 2022, dibuka pukul 13.33 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke-2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda laporan Panja 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua ke Raker Tingkat 1, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI dan Pemerintah, pengambilan keputusan dan penandatanganan draf 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua, dan penandatanganan peta wilayah, sebagai berikut:

1. Laporan Panja 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua, sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang UU No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, khususnya pada Pasal 76 Ayat 2 yang menyatakan: *"Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosialbudaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua"*.
  - b. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Komisi II DPR RI, telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:
    - i. Rapat Kerja Tk. I, tanggal 21 Juni 2022, dengan agenda penjelasan/keterangan DPR RI, pandangan Pemerintah, pandangan Komite I DPD RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta pembentukan Panja.
    - ii. Rapat Dengar Pendapat Panja 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua dengan Gubernur Papua, DPR Papua dan MRP, tanggal 22 Juni 2022, dengan agenda rapat adalah pembahasan DIM.
    - iii. Rapat Dengar Pendapat Umum Panja 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua, tanggal 22 Juni 2022, dengan

agenda menerima aspirasi terkait 3 (tiga) RUU Usul DPR RI tersebut.

- iv. Kunjungan Kerja Panja dalam rangka mencari masukan ke Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayapura.
- v. Rapat Dengar Pendapat Panja Panja 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua, pada tanggal 27 Juni 2022, dengan agenda laporan hasil pembahasan di tingkat Timus dan Timsin, dan selanjutnya disepakati oleh Panja menjadi draft akhir untuk dilaporkan kepada Raker Tingkat I.
- vi. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), tanggal 28 Juni 2022, dengan agenda mendapatkan masukan terhadap 3 (Tiga) RUU Provinsi di Provinsi Papua khususnya terkait pengisian formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di 3 (tiga) calon Provinsi hasil pemekaran di Papua sebagai bahan pertimbangan untuk dimasukkan menjadi materi muatan (pasal) dalam RUU.
- vii. Rapat Kerja Tk. I, tanggal 28 Juni 2022, dengan agenda Pendapat Akhir Mini Fraksi – Fraksi, Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Draft 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua, dan penandatanganan Peta Wilayah.

2. Penyampaian pendapat mini fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, sebagai berikut:

- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.
- b. Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Demokrat menyetujui 5 (lima) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur **dengan catatan**.
- c. DPD RI menyetujui 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.
- d. Pemerintah menyetujui 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

### III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke-2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda laporan Panja 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua ke Raker Tingkat 1, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI dan Pemerintah, pengambilan keputusan dan penandatanganan draf 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua, dan penandatanganan peta wilayah, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI bersama dengan DPD RI dan Pemerintah menyetujui dan menandatangani draf 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.52 WIB.

Jakarta, 28 Juni 2022

~~KETUA RAPAT~~



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG *ditk*

A-270